



Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

(Human Rights Due Diligence)

Tinjauan Singkat untuk Perusahaan Kelapa Sawit

Mengapa Uji Tuntas HAM?

- ❖ Perusahaan diharapkan untuk menghormati HAM dalam operasi bisnis dan rantai pasok
- ❖ Permintaan ini berasal dari masyarakat sipil, konsumen dan semakin besar dari investor serta pemerintah melalui undang-undang.
- ❖ Hal ini logis secara bisnis, karena:
 - Menurunkan biaya-biaya jangka panjang (keuangan, manajemen konflik, reputasi)
 - Mengurangi risiko kegagalan bisnis
 - Nilai merek/reputasi perusahaan
 - Tingkat retensi staf yang lebih tinggi
 - Biaya pergantian staf yang lebih rendah
 - Peningkatan produktivitas
 - Memperluas bakat/ketrampilan
 - Motivasi pegawai
 - Meningkatkan ijin social untuk beroperasi

Proses Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD) memberi perusahaan pendekatan sistematis untuk menghormati hak asasi manusia.

HRDD memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif **mengidentifikasi, menangani, mencegah, mengurangi dan memulihkan pelanggaran HAM, seperti pekerja anak, kerja paksa, jam kerja yang berlebihan, dll** dari pada menggunakan pendekatan yang responsif dan kurang efektif.

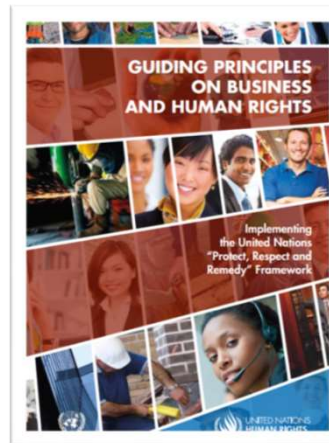
HRDD mendukung perusahaan dalam implementasi **Kebijakan Tanpa Eksploitasi** dalam Komitmen NDPE

Menempatkan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia ke dalam konteks

- Perusahaan diharapkan **untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dan masyarakat dihormati sepenuhnya** di tingkat operasi grup perusahaan dan dalam rantai pasokan mereka
- Untuk mencapai hal ini, perusahaan **perlu mengadopsi pendekatan perilaku bisnis yang bertanggung jawab** yang menjabarkan *komitmen* mereka untuk menghormati hak asasi manusia, membangun *sistem dan praktik yang efektif* untuk memastikannya dapat memenuhi komitmennya, dan *memulihkan* kerugian yang disebabkan dan dikontribusikan
- Salah satu aspek kunci dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah **Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD)**, yang didefinisikan sebagai proses manajemen berkelanjutan yang perlu diterapkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana perusahaan mengatasi dampak buruk terhadap HAM
- UU mengharuskan perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM dalam bisnis dan rantai pasok (misalnya, seperti yang dibahas oleh Uni Eropa) daripada melaporkan aspek sosial tertentu dalam rantai pasok (misalnya, undang-undang perbudakan modern).

Konsep HRDD dikembangkan oleh United Nations Guiding Principles (UNGPs) tentang Bisnis dan HAM

HRDD adalah salah satu komponen pendekatan yang direkomendasikan oleh UNGP untuk “Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab: untuk perusahaan menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menghormati HAM



Pendekatan UNGP untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab

- I. **Komitmen Kebijakan**
- II. **Uji Tuntas HAM (HRDD)**
 - I. Melakukan penilaian dampak aktual dan potensial HAM
 - II. Melakukan integrasi dan bertindak berdasarkan temuan yang ada
 - III. Mengukur kinerja
 - IV. Melakukan komunikasi tentang cara penanganan dampak
- III. **Proses-proses agar remediasi dapat dilakukan**

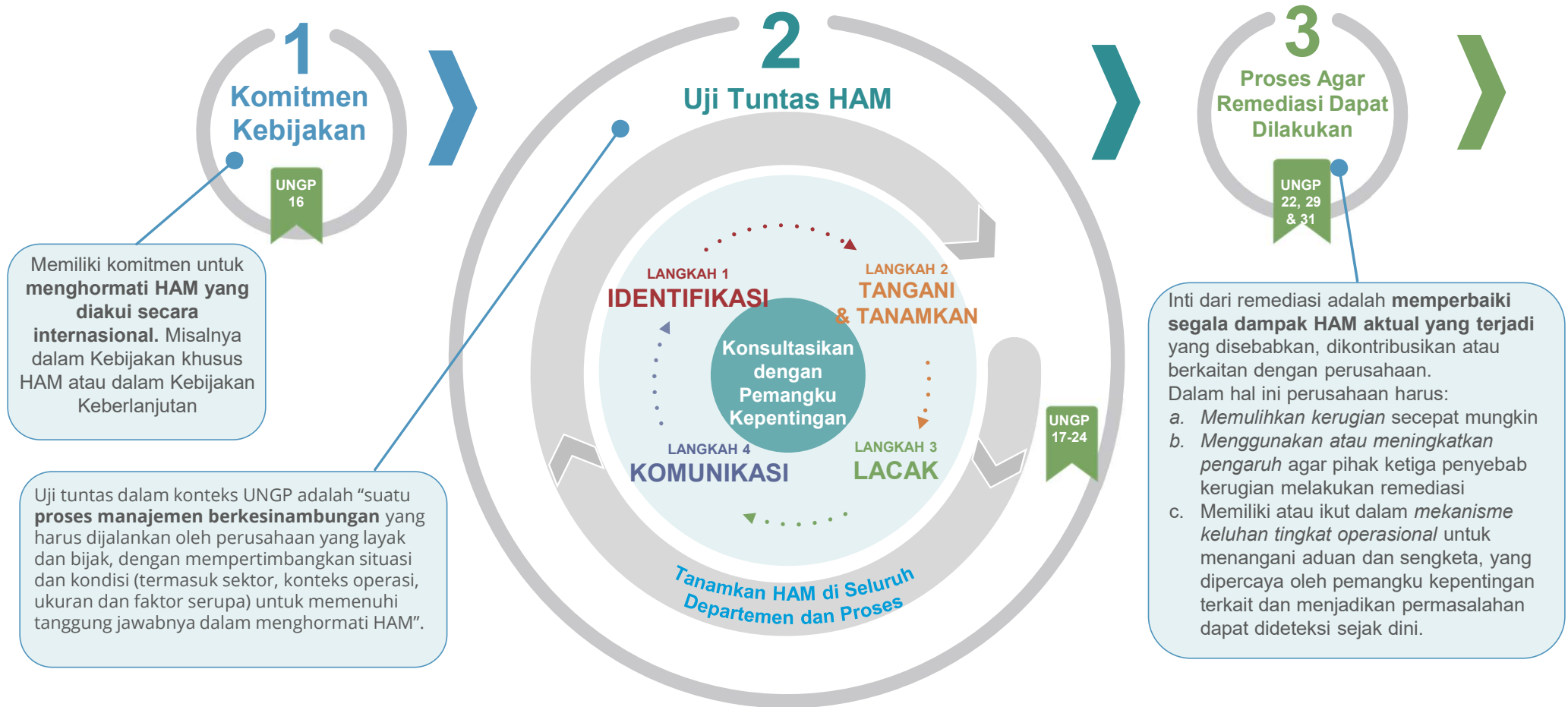
Apa itu Uji Tuntas Hak Asasi Manusia?



Uji tuntas hak asasi manusia bukanlah formula preskriptif tunggal. Perusahaan dengan ukuran yang berbeda, dalam industri yang berbeda, dengan struktur perusahaan yang berbeda dan dalam keadaan operasi yang berbeda **perlu menyesuaikan proses-proses** untuk memenuhi karakteristik yang berbeda ini.

Namun, elemen kunci dari uji tuntas hak asasi manusia—menilai, mengintegrasikan dan bertindak, melacak, dan mengomunikasikan—ketika digabungkan dengan proses remediasi, memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan oleh **manajemen perusahaan** mana pun untuk **mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia dalam praktiknya.**

Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab



Uji Tuntas HAM

2

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

Menempatkan risiko-risiko yang dapat terjadi pada manusia dalam pengambilan keputusan

Keterlibatan yang berarti oleh para pemangku kepentingan

Menanamkan aksi/tindakan dalam proses perusahaan dan lintas departemen

Ketertelusuran melalui pemetaan rantai pasok ke tingkat produksi merupakan elemen yang dapat memungkinkan uji tuntas hak asasi manusia



Source: Proforest 2020

HRDD untuk perusahaan di berbagai titik dalam rantai pasok kelapa sawit

'Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab' UNGP yang sama **berlaku untuk semua perusahaan baik di hulu maupun hilir.**

Harapan yang sama untuk melaksanakan HRDD juga berlaku untuk perusahaan hulu dan hilir

Perbedaan mendasar Tindakan yang diambil: **semakin dekat perusahaan dengan lokasi produksi, semakin besar kemungkinan langkah-langkah HRDD melibatkan keterlibatan langsung dengan pemegang hak.** Sebagai contoh:

- Lebih dekat ke lokasi produksi **penilaian** hak asasi manusia akan melibatkan kerja lapangan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak tentang risiko dan cara untuk mengatasi risiko tersebut. Lebih jauh ke hilir, penilaian berbasis *desktop*, dan konsultasi dengan perwakilan kelompok pemangku kepentingan, dan 'perwakilan yang kredibel' seperti organisasi masyarakat sipil.
- Lebih dekat ke lokasi produksi, **keterlibatan pemangku kepentingan** selama proses HRDD (misalnya menyetujui tindakan yang tepat, kinerja untuk mengatasi dampak yang merugikan) akan dilakukan secara langsung dengan para pemangku kepentingan itu sendiri.
- Komunikasi dan pelaporan dampak yang lebih dekat ke lokasi produksi harus disesuaikan **dengan komunikasi dengan pemegang hak** yang terkena dampak langsung, serta pemangku kepentingan lainnya.



HRDD adalah proses manajemen hak asasi manusia baik untuk operasi perusahaan sendiri maupun untuk pasokan dari sumber-sumber yang bertanggung jawab

Uji Tuntas HAM dalam rantai pasok

a. Contoh perusahaan hilir yang memiliki peran dalam rantai pasok



2 Uji Tuntas Hak Asasi Manusia

LANGKAH 1

IDENTIFIKASI

- Contoh:
- Penilaian Risiko HAM pada rantai pasok
 - Penilaian dampak hak asasi manusia yang lebih terperinci untuk pemasok atau wilayah pemasok berisiko tinggi

STEP 4

KOMUNIKASI

- Contoh:
- Laporan Keberlanjutan Tahunan
 - UK Modern Slavery statement
 - Halaman web tentang hak asasi manusia/keberlanjutan
 - [UNGP Reporting Framework](#)
 - [Global Reporting Initiative](#)

LANGKAH 2

TANGANI & TANAMKAN

- *Contoh penanganan:* 1) Develop action plan to mitigate, prevent and embed human rights in the supply chain management systems; 2) Use leverage with suppliers to stop, mitigate and remediate human rights abuses (e.g. contracts, sourcing decisions, incentives, etc.); 3) Engage at landscape or sector level to address systemic & sector-wide impacts
- *Contoh penanaman:* 1) memasukkan persyaratan hak asasi manusia dalam kartu skor pemasok; 2) termasuk hak asasi manusia dalam penyaringan orientasi pemasok; 3) termasuk kebijakan hak asasi manusia dan komitmen proses dalam kontrak, keputusan pengadaan, kriteria seleksi untuk program lanskap dan audit pemasok

LANGKAH 3

LACAK

- Contoh:
- Sistem pelacakan keluhan
 - Melacak dampak pada tingkat lanskap



Source: Proforest 2020



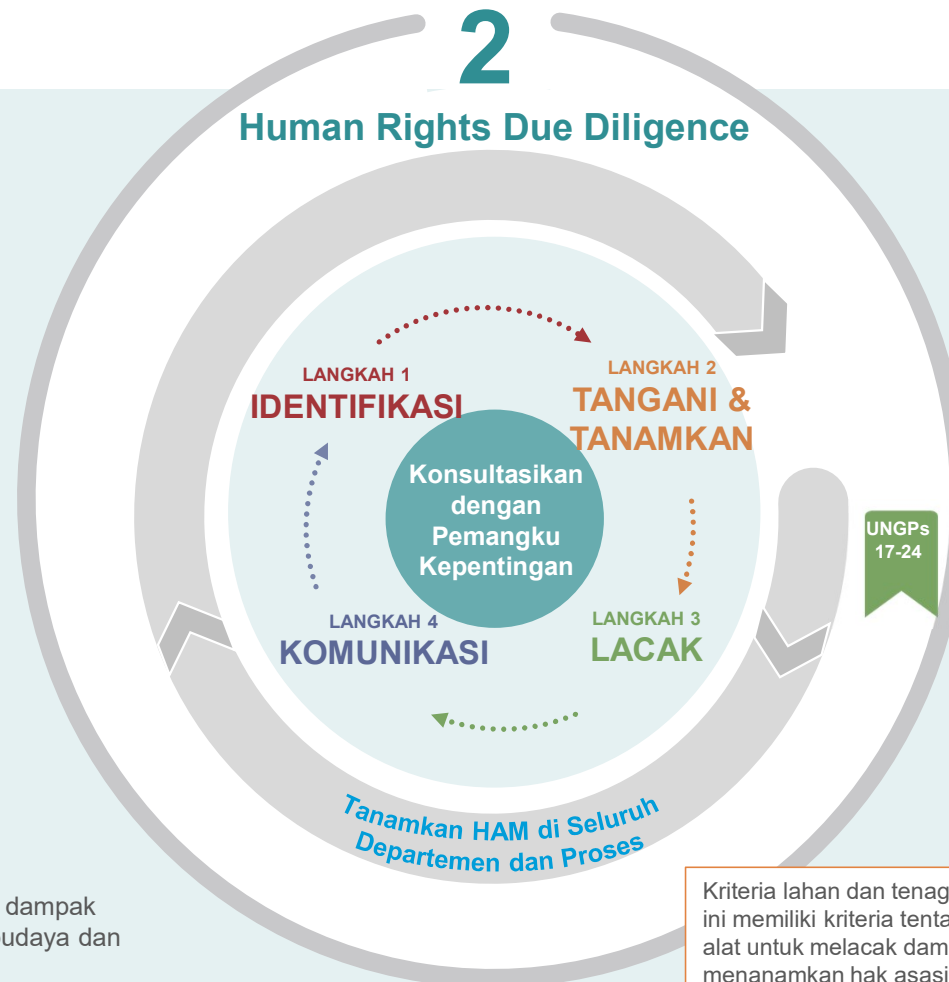
Produsen



Pabrik, prosesor utama, agregator

b. Contoh ilustrasi untuk perusahaan hulu

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia



LANGKAH 1

IDENTIFIKASI

Contoh:

- Penilaian risiko hak asasi manusia dari operasi sendiri dan pemasok pihak ketiga (misalnya pemasok bahan mentah ke pengolah)
- Penilaian risiko hak asasi manusia dapat dimasukkan ke dalam pemetaan risiko yang ada, mis. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) dan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV)
- Penilaian dampak hak asasi manusia yang lebih terperinci untuk pemasok atau wilayah pemasok berisiko tinggi
- Berkonsultasi dengan pemegang hak, Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) dan Organisasi Masyarakat Sipil/CSO

LANGKAH 4

KOMUNIKASI

Contoh:

- Laporkan kepada pemegang hak bagaimana dampak ditangani dengan cara yang sesuai dengan budaya dan dalam bahasa yang dipahami

LANGKAH 2

TANGANI & TANAMKAN

Contoh:

- Rencana tindakan dengan garis waktu, tanggung jawab, dan KPI yang jelas untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan
- Tindakan khusus akan menanggapi dampak hak asasi manusia aktual dan potensial yang diidentifikasi. Misalnya, mungkin termasuk menerapkan perekrutan yang bertanggung jawab untuk pekerja migran, meningkatkan pelaksanaan komitmen FPIC untuk ekspansi, dll.

LANGKAH 3

LACAK

Contoh:

- Mekanisme Pengaduan tingkat operasional
- Alat suara pekerja/workers' voice tools
- Sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan pemegang hak, pembela HAM dan CSO, mis. pemantauan berbasis masyarakat

Kriteria lahan dan tenaga kerja NDPE Implementation Reporting Framework (IRF) saat ini memiliki kriteria tentang proses (bukan kinerja). Jadi itu tidak akan dianggap sebagai alat untuk melacak dampak (langkah 3). Pada tahap ini, ini lebih merupakan alat untuk menanamkan hak asasi manusia ke dalam manajemen rantai pasokan dan mendorong peningkatan tindakan oleh pabrik (langkah 2).

Referensi Tambahan

1. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
2. OHCHR, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretative Guide
3. OECD Guidelines for Multinational Enterprises
4. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
5. Shift, Respecting Human Rights Through Global Supply Chains
6. Accountability Framework Operational Guidance
7. UNDP, Human Rights Due Diligence Training Facilitation Guide